

Pagar Pasar Ir. Soekarno Di-police Line

SUKOHARJO - Buntut laporan PT Ampuh Sejahtera ke Polres Sukoharjo terkait perusakan gembok pagar proyek Pasar Ir Soekarno, berlanjut.

Polres Sukoharjo memasang garis polisi persis di pagar yang terbuat dari seng itu, kemarin. Kendati demikian, proses pemeriksaan yang dilakukan tim audit BPK dan UGM tetap berjalan.

"Kemarin kami memasang garis polisi di lokasi kejadian (pagar-Red). Selanjutnya, siapapun yang ingin masuk, termasuk tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan harus berkoordinasi dengan kami," kata Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Yulius

Herlinda.

Kanit Tipikor Satreskrim Ipd Sarman menambahkan, pihaknya akan mengawal dan mendampingi petugas dari BPK melakukan pemeriksaan pasar.

Terkait kasus pasar yang saat ini sedang disidik Polres, pihaknya mengatakan, semua pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Namun pihaknya tetap akan menunggu hasil pemeriksaan BPK.

Tujuannya untuk mengetahui berapa kerugian negara dalam proyek tersebut. "Semua pihak yang terkait sudah kami panggil untuk dimintai keterangan. Namun untuk proses selanjutnya tetap menunggu audit BPK," ujarnya.

Meskipun, kata dia, pihaknya sudah meminta hasil audit dari BPKP, beberapa waktu lalu, namun karena auditor BPK sudah masuk ke pasar, pihaknya akan menggunakan hasil BPK. Terlebih, tidak boleh dalam satu objek itu ada dua auditor negara.

Kasus Rumit

Salah satu penyidik Kejari Sukoharjo yang enggan disebut namanya mengatakan, kasus tersebut memang pelik dan rumit. Karena itu, butuh ketelitian dan kejelian dalam menyidik.

"Pada saat kami melakukan penyelidikan kasus itu, semua sudah kami periksa juga. Kami juga sudah masuk ke pasar untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi proyek," ujar penyidik ini.

Yang menjadi rumit, hingga saat ini, khususnya pada saat tim Kejari masuk, proyek belum jelas sudah berapa persen. Sebab, PT Ampuh mengklaim sudah 100% dari nilai kontrak Rp 24,8 miliar, sedang Pemkab belum yakin.

Kalau dilihat dari kacamata awam, pasti arah pertanyaan ke konsultan perencanaan. Akan tetapi tidak, yang perlu dipertanyakan adalah konsultan pengawas.

Penyidik tidak membantah terkait temuan tim BPK di proyek pasar itu, di antaranya meteran yang disangkikan

PLN Tidak Pernah Keluarkan Meteran

SUKOHARJO - PLN Sukoharjo menegaskan, tidak pernah mengeluarkan KWh meter (meteran listrik) di kios Pasar Ir Soekarno.

Meteran yang terpasang di kios Pasar Ir Soekarno menjadi salah satu sorotan tim auditor BPK. Sebab, meteran tersebut masih menggunakan model lama.

Di satu sisi, sejak 2010 PLN, sudah tidak lagi mengeluarkan meteran model lama karena berganti dengan meteran pulsa.

Hanya saja, PLN tetap menyediakan produk lama untuk mengantisipasi kalau ada pelanggan yang meterannya rusak.

"Kami memang beberapa waktu lalu kedatangan BPK menanyakan meteran di Pasar Ir Soekarno, apakah keluaran PLN atau bukan. Kami jawab bukan dan tidak pernah mengeluarkannya," ujar Manager PLN Rayon Sukoharjo Untung Cahyono.

Meteran yang dikeluarkan oleh PLN selalu ada dua segel. Pertama segel dari PLN dan satunya dari Badan Metrologi.

Akan tetapi kalau menurut gambar yang ditunjukkan BPK, menurut Untung, meteran di pasar bukan produknya dan tidak ada segelnya.

Karena itu, pihaknya tidak tahu itu produksi dari mana. Kemungkinan dari pihak lain yang sudah kerja sama dengan pelaksanaan proyek.

"Kami memang tidak memproduksi sendiri, tetapi oleh rekanan. Hanya saja setiap keluaran dari kami di samping plastik itu ada segelnya dua. Satu dari PLN dan satu dari Badan Metrologi," tegas Untung.

Terkait harga, Untung mengatakan, untuk meteran produk lama keluaran tahun 1990, harganya Rp 200 ribu/kwh/buah.

500 Kios

Pengendali Teknis Audit dari BPK Chairil Anwar Lubis membenarkan klarifikasinya ke PLN. "Kami tanya apakah itu meteran keluaran PLN atau bukan, sebab di sana tertera produk PLN. Oleh PLN dijawab bukan. Kalau memang bukan itu darimana

dan harganya berapa," ujar Chairil.

Menurutnya, PLN menegaskan tidak pernah menjual meteran (KWh) ke proyek Pasar Soekarno. Karena itu, pihaknya baru mendalami asal dan harga produk tersebut.

Terkait yang sudah ada di pasar, sesuai dalam kontrak disebutkan satu kios Rp 1,7 juta. Kios di pasar ada 500.

"Versi PLN, meteran lama itu akan menyulitkan. Kaitannya dengan penagihan biaya. Kalau dengan meteran pulsa lebih mudah, karena begitu tidak diisi oleh pengguna, aliran listrik putus."

Perwakilan PT Ampuh Sejahtera Ajiyono menegaskan, meteran itu dipasang oleh biro. Kalau beli darimana, pihaknya tidak tahu. Yang jelas, dalam kontrak di pasar, PT Ampuh hanya instalasi, KWh, dan panel.

"Kami belum pernah mengajukan sambungan ke sana. Trafo belum ada. Jadi yang ada dalam kontrak hanya instalasi, Kwh meter, dan panel," tandas Ajiyono. (H46-61,15)